

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi setiap warga negara, oleh karena itu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas adalah amanat yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan, lokal, nasional, dan global. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang dasar bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan. Sekolah Dasar termasuk lembaga pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai entitas akuntansi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan yang ditetapkan. Sekolah memiliki wewenang dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip

pengelolaan keuangan dan diharapkan dana yang beredar dapat dimanfaatkan dengan optimal. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu hal penting yang ada di setiap organisasi, karena dengan dilakukan pengelolaan keuangan yang baik akan sangat membantu memperlancar segala kegiatan yang dimiliki oleh organisasi tersebut (Purnamawati & Adnyani, 2020). Pengelolaan keuangan ialah bagian dari tugas pimpinan perusahaan dengan tanggungjawab utama berupa keputusan penting menyangkut investasi dan pembiayaan perusahaan. Selain itu, pihak pemerintah juga memberikan wewenang agar sekolah dapat mencari sumber keuangan yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah berlaku. Kegiatan tersebut dinamakan dengan kegiatan pendanaan pendidikan. Empat prinsip yang dapat digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Realisasi, (3) Penerimaan dan pengeluaran dana, (4) Pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban.

Pemerintah selalu merencanakan berbagai upaya untuk meraih solusi dari masalah pemerataan pendidikan. Salah satu solusi pemerintah dalam pemerataan pendidikan tersebut dengan memberikan suatu program pengalokasian anggaran yang umum disebut dengan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Program dana BOSP merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada lembaga pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar (Womsiwor, Rofingatun, & Allolayuk, 2020). Pengelolaan dana BOSP ditetapkan sejak bulan Juli tahun 2005 lalu dengan besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan

dikalikan dengan besarnya satuan bantuan. Permendikbudristek No.63 Tahun 2023 terkait besaran alokasi dana BOSP dinyatakan bahwa:

“Besaran alokasi dana BOSP dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik pada sekolah tertentu”.

Oleh sebab itu, berdasarkan peraturan tersebut dinyatakan dana BOSP untuk Sekolah Dasar sebesar Rp 900.000,00 per 1 orang peserta didik .Dalam penerimaan dana BOSP khususnya daerah Provinsi Bali, sekolah berpedoman pada buku petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP yang diterbitkan oleh Permendikbudristek No.63 Tahun 2023. Proses pelaksanaan keuangan pada segi penerimaan, sumber keuangan sekolah berasal dari yayasan dan pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan dana pendidikan gratis (Sari & Saputro, 2023). Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana BOSP diperlukan suatu analisis yang akan membantu dalam menghasilkan dan menyajikan suatu informasi yang jelas sehingga mampu memberikan landasan dari pembutaan kebijakan dalam memberikan keputusan serta juga dapat menjadi suatu tolak ukur dalam menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan suatu program. Analisis merupakan penyelidikan terhadap peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang dikenal sebagai kota pendidikan. Hal ini didasari oleh tingginya jumlah lembaga pendidikan pada daerah tersebut. Dilakukannya penelitian ini di Kabupaten Buleleng dapat dilihat berdasarkan jumlah total lembaga pendidikan pada daerah Kabupaten Buleleng paling banyak dibandingkan dengan Kabupaten lain yang berada di Provinsi Bali. Dengan total lembaga Sekolah Dasar (SD) yaitu berjumlah 465 Sekolah sebagai berikut:

**Tabel.1**  
**Data Jumlah SD Provinsi Bali Tahun 2024**

<b>N0</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sekolah Dasar (SD)</b>
1	Buleleng	465
2	Denpasar	239
3	Badung	287
4	Tabanan	287
5	Karangasem	357
6	Gianyar	291
7	Jembrana	185
8	Bangli	164
9	Klungkung	133

(Sumber: Dapo.kemdikbud)

Berdasarkan data tabel 1 dapat dijelaskan bahwa total lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Buleleng berjumlah 465 sekolah. Kemudian, total lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Denpasar berjumlah 239 sekolah. Pada Kabupaten Badung total lembaga pendidikan Sekolah Dasar daerah tersebut berjumlah 287 sekolah. Selanjutnya, total lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tabanan berjumlah 287 sekolah. Total lembaga pendidikan pada Kabupaten Karangasem berjumlah 357 sekolah. dan total lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gianyar berjumlah 291 sekolah. Terakhir total jumlah lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Jembrana, Bangli dan Klungkung masing-masing yaitu 185, 164 dan 133 sekolah.

Dalam data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) Provinsi Bali yang bersumber dari Kemendikbudristek didapatkan bahwa jumlah daerah yang paling banyak memperoleh dana BOSP adalah Kabupaten Buleleng. Sehingga hal tersebut yang mendasari pengambilan penelitian ini di Kabupaten Buleleng. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 6

Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang menerima dana dari pemerintah yaitu dana BOSP.

**Tabel. 2**  
**Data Jumlah Peserta Didik Tahun 2024**

No	Nama Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Siswa
1	SDN 1 Sangsit	246	224	470
2	SDN 2 Sangsit	113	85	198
3	SDN 4 Sangsit	148	159	307
4	SDN 6 Sangsit	49	48	97

(Sumber: Dapo.kemdikbud)

Berdasarkan data tabel 2 dapat dijelaskan bahwa total jumlah peserta didik di SDN 1 Sangsit berjumlah 470 siswa. Kemudian, total jumlah peserta didik di SDN 2 Sangsit berjumlah 198 siswa. Selanjutnya jumlah peserta didik pada SDN 4 Sangsit berjumlah 307 siswa. Dan total jumlah peserta didik pada SDN 6 Sangsit yaitu berjumlah 97 siswa. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa SDN 6 Sangsit merupakan sekolah yang memiliki jumlah total peserta didik yang cukup sedikit dibandingkan dengan beberapa SD yang lain. Jumlah siswa tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap dana BOSP yang diberikan pemerintah kepada Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit yang dimana nantinya dana tersebut akan dikelola oleh pihak sekolah melalui sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman Petunjuk Teknis (Juknis) Permendikbudristek No.63 Tahun 2023. Untuk pengelolaan dana BOSP Sekolah Dasar Negeri 6 sangsit dalam pengelolaannya sudah melalui beberapa tahapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BOSP Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit menjelaskan bahwa:

“Untuk proses pengelolaan dana BOSP itu yang pertama melalui perencanaan dulu dik, kemudian setelah itu baru pelaksanaannya, lalu lanjut pada pengawasan dananya, dan tahap yang terakhir yaitu pelaporan terkait pengelolaan dana BOSP dik”

Dalam pengelolaan dana BOSP kerap terjadi kendala teknis akibat dari keterlambatan pencairan dana dari pemerintah yang mengakibatkan operasional sekolah tidak berjalan sesuai dengan waktu. Hasil wawancara dengan Bendahara BOSP di Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit yang menyatakan bahwa:

“Dalam proses pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit sejauh ini masih lancar saja dik, dan belum bisa dipastikan juga kedepannya bakal kayak gimana dik namun biasanya yang menjadi kendala itu adalah terkait keterlambatan datangnya penyaluran dana BOSP dari pusat dik, sehingga hal ini bisa mengakibatkan operasional sekolah tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan dik”

Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang sudah terakreditasi dan masih terus berkembang hingga sampai sekarang ini. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang telah dilakukan ditemukan kendala yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit yaitu keterlambatan datangnya dana dari pusat menyebabkan terhambatnya kelancaran kegiatan serta proses belajar mengajar di sekolah. Terjadinya berbagai kendala tersebut mengakibatkan perubahan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) awal. Kemudian, pihak sekolah mengatasi kendala tersebut dengan melakukan penyusunan RKAS ulang yang menyesuaikan terhadap kondisi saat ini tentunya harus sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang terbaru dari pemerintah.

Mengenai pengelolaan dana BOSP, permasalahan umum yang sering terjadi di sekolah-sekolah ialah masih dikenakannya pungutan biaya kepada siswa atau siswi, keterlambatan pencairan dana, tidak transparannya dalam penggunaan dana BOSP, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi

pendataan siswa, serta kelemahan lain pelaksanaan program dana BOSP adalah secara konseptual dana BOSP diperuntukkan kepada siswa atau siswi yang kurang mampu atau masyarakat ekonomi ke bawah, namun kenyataannya di lapangan belum sepenuhnya siswa atau siswi yang kurang mampu mendapatkan pelayanan pendidikan secara memadai. Oleh karena itu, hal ini sangat bertentangan dengan konsep program dana BOSP sehingga perlu untuk diluruskan.

Selain permasalahan di atas terdapat permasalahan lain terkait pengelolaan dana BOSP yang terjadi, seperti di lansir dari berita Radar Buleleng.jawapos.com di mana Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Selat terancam dibebaskan tugas akibat memerintahkan bendahara untuk memalsukan tanda tangan ketua komite pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) guna untuk mempercepat realisasi dana tersebut. Terkait hal itu ketua komite meminta agar Disdikpora Buleleng memberikan pembinaan kepada kepala sekolah, dengan menggeser jabatan atau menggantikannya dengan orang lain. Selain itu, ketua komite membawa persoalan ini ke pihak kepolisian sehingga mengenai sanksi juga menunggu kelanjutan proses hukum. Selain permasalahan itu terdapat juga masalah lain terkait pengelolaan dana BOSP, seperti di lansir dari berita radarbali.jawapos.com di mana gegara dana BOSP pas-pasan SDN 2 Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Buleleng tidak mampu membeli bangku kayu untuk siswanya karena dana BOSP yang ada di sekolah tersebut habis digunakan untuk membayar gaji guru honorer sehingga dampaknya sekolah terpaksa membeli bangku plastik untuk proses belajar mengajar siswa.

Dari latar belakang dan uraian masalah yang telah dipaparkan di atas dan karena luasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka hanya dibatasi pada pokok

permasalahan dalam penelitian ini yaitu **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Keterlambatan sekolah dalam meraih informasi terkait perubahan aturan pertanggungjawaban dana BOSP.
2. Adanya keterlambatan penyaluran dana BOSP, karena setiap kegiatan membutuhkan dana sehingga terlambatnya penyaluran dana BOSP dapat menghambat kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.
3. Belum dilakukannya analisis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana BOSP ditinjau dari prinsip pengelolaan dana BOSP.

### **1.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat terlihat betapa banyaknya permasalahan yang timbul. Agar permasalahan yang diteliti dapat terfokus dan tidak menjangkau terlalu luas, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada beberapa masalah yaitu pengelolaan dana BOSP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pengelolaan dana BOSP di Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya mengetahui kendala dan cara mengatasi kendala oleh pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOSP di Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka muncul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan dalam Pengelolaan Dana BOSP di Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOSP dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan dana BOSP di Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan Dana BOSP di Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOSP di Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya peneliti sebagai pengetahuan baru serta organisasi bersangkutan yang menjadi objek penelitian mengenai pengelolaan dana BOSP, serta hasil penelitian ini memberikan bukti empiris tentang praktik pengelolaan dana BOSP yang diimplementasikan oleh sekolah menyesuaikan petunjuk teknis Permendikbudristek.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengaplikasikan teori yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, khususnya pengelolaan dana BOSP yang diperoleh selama perkuliahan dengan permasalahan yang terdapat di lapangan.

### b. Bagi Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penerapan pengelolaan dana BOSP di Sekolah Dasar Negeri 6 Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng terkait dengan kebijakan petunjuk teknis Permendikbudristek dalam pengelolaan keuangan.

### c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana BOSP yang diteliti mahasiswa, serta mampu untuk dijadikan bahan referensi atau pertimbangan untuk penelitian yang akan mendatang.